



DOKUMEN

RENCANA PROGRAM KERJA: PENGAWASAN MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BANJARMASIN BAIMAN (Barasih Wan Nyaman)

(Helmi Rifai, SH- CalegPartai NASDEM- DPRD KALSEL : DAPIL: Banjarmasin

(Pengalaman: Komisaris PT Langit, General Manager PT JIKI, Dirum BUMD PT Tala Manuntung,
KetuaPaklinaKalsel, Advokat)

1. Latar Belakang

Gerak pembangunan Kota Banjarmasin, sebagai Kota Seribu sungai terus berlangsung dengan mengusung tujuan bersama secara nasional menuju “pembangunan berkelanjutan”. Selaras dengan Visi Misi Banjarmasin Baiman dengan kelanjutan pembangunan Kota Banjarmasin yang “Barasih Wan Nyaman atau Banjarmasin Baiman. Baiman dan Lebih martabat adalah untuk Banjarmasin. Menuju 2025, menjadikan Banjarmasin sebagai Kota Sungai menuju gerbang ekonomi Kalimantan 2025. Akuntabilitas pembangunan pada semua sector di Kota Banjarmasin, diperjuangkan dalam program pembangunan pada setiap SKPD pada Pemko Banjarmasin.

Pembangunan yang mensejahterakan masyarakat Kota Banjarmasin, dalam kekhususan sebagai rakyat Banua menjadi kewajiban kita semua. Hal ini memerlukan integrasi dengan menyeleraskan setiap sector pembangunan ke dalam tujuan, indikator dan target secara berencana. Dilakukan dengan tata kelola yang baik (good governance) yang melibatkan peran legislative, eksekutif, dan yudikatif. Setiap pembangunan sektoral diinterasikan agar dapat menuju 4 pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari 17 aspek SDGs. Secara berkesinambungan akuntabilitas pembangunan Kota Banjarmasin direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dalam pengawasan bersama legislative.

Hingga saat sekarang dan menghadapi perjalanan waktu ke depan kita berhadapan dengan komitmen yang sudah disepakati untuk terus diwujudkan. Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Kementerian PPN/Bappenas, 2018) di dalam NKRI menuju 2030. Kita berkepentingan mewujudkannya, sebagaimana hal ini telah menjadi kesepakatan global (UN/PBB, 2017).

Pembangunan yang diperjuangkan dalam setiap fase kehidupan berbangsa dan bernegara dengan peran pemerintah dan legislative, yudikatif, dan partisipasi dunia usaha, serta masyarakat masih menghadapi tantangan terstruktur untuk dapat sepenuhnya memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Di tingkat Banua kita, Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, tantangan yang dihadapi bersumber bukan dari ketiadaan rencana yang ditetapkan, tetapi terjadi karena belum sepenuhnya dan tidak lengkapnya pendekatan mengintegrasikan kepada yang seharusnya menjadi tujuan dalam dokumen perencanaan dengan cara mencapainya, karena tidak dibangunnya syarat implementasi dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

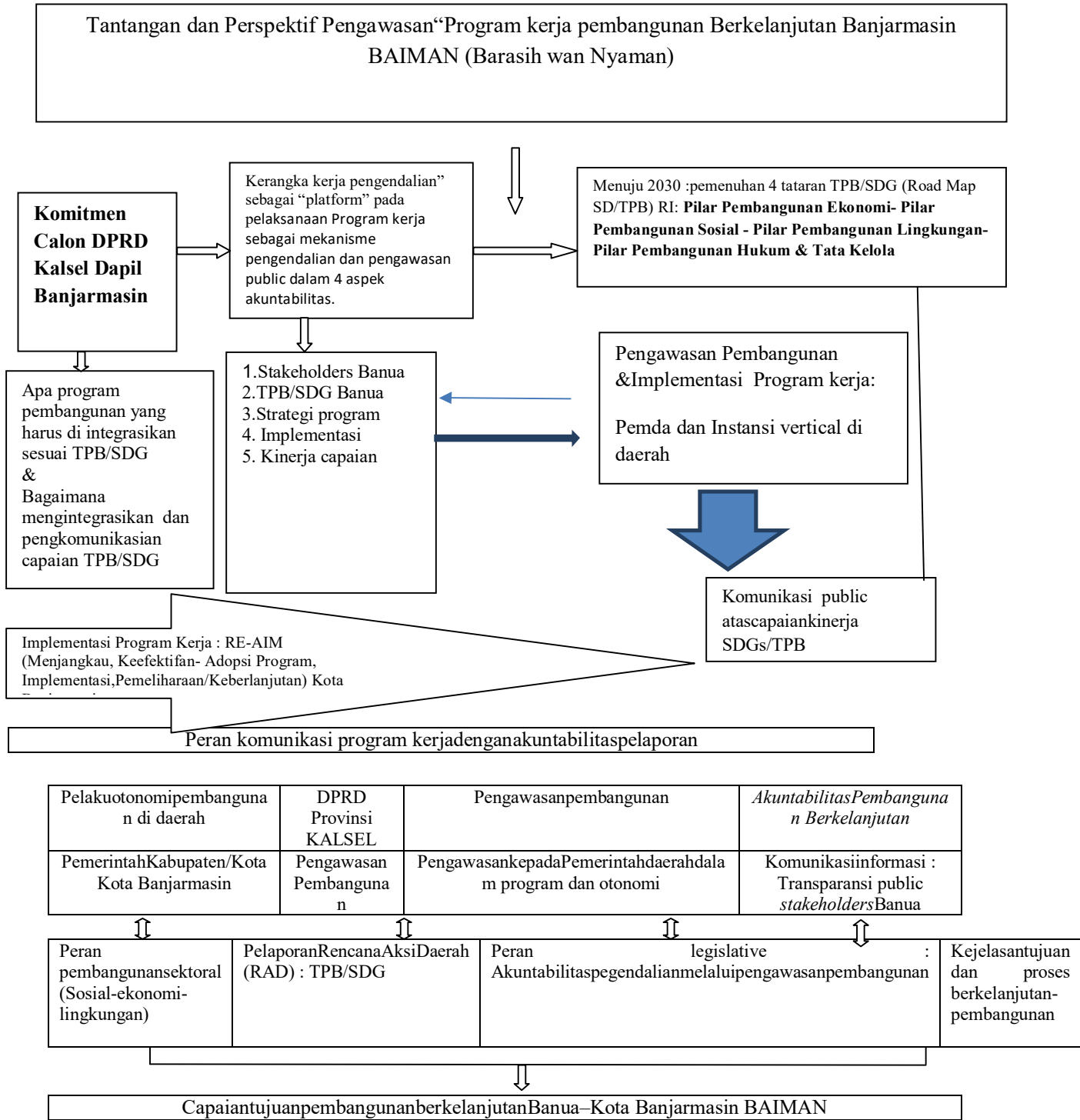
Secara mendasar terdapat syarat implementasi dalam menjangkau efektifitas pembangunan yang selaludi idamkan dapat dicapai di setiap rentang waktu, yaitu hadirnya rezim penguasa yang berkeadilan. Hanya hal ini tidak mudah dicapai, dimana dengan rezim yang berkuasa terkait bagaimana kejelasan layanan pemerintahan, aspek hukum yang berkeadilan, norma social dan budaya. Pemerintahan seharusnya mengemban peran “agent of development” melalui hubungan peran institusi secara internal pemerintahan, maupun dalam hubungan dengan legislative, yudikatif, dunia usaha dan masyarakat. Legislatif melakukan fungsi pengawasan keberlanjutan pembangunan.

Melalui fungsi dan peran dari calon anggota DPRD Kalimantan Selatan, Dapil Kota Banjarmasin, dengan kendaraan politik Partai Nasdem yang menjadi salah satu poros dari 3 partai dalam “Koalisi Perubahan”, yang bersama berjuang mendukung pemimpin Nasional “ARB”. Helmi Rifai, SH, berjuang dalam upaya mencapai efektifitas implementasi dalam menerapkan peran “agent of development” pada konstituen pemilih di Dapil Kota Banjarmasin. Memerlukan dukungan konstituen atau pemilih dari masyarakat Kota Banjarmasin. Mohon memberikan suaranya dengan komitmen yang saya tuangkan dalam visi “MENJADIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BAIMAN (Barasih Wan Nyaman). Pengawasan pada pelaksanaan program kerja pembangunan yang berkelanjutan untuk Banua Kalimantan Selatan, dengan Kota Banjarmasin sebagai bagian tak terpisahkan.

Menjadi penting sebagai komitmen kami kami untuk menggunakan “kerangka kerja pengendalian” sebagai “platform” pada pelaksanaan Program kerjadi tingkat eksekutif, dengan mekanisme pengawasan pembangunan dalam 4 aspek akuntabilitas. Pengawasan pada program kerja pembangunan berorientasi pada kepentingan hak masyarakat serta dari dampak pembangunan berkeadilan menjadikan masyarakat unsure penting subjek pembangunan. Meliputi : Pengawasan pada tujuan 4 tataran TPB/SDG ((i)

Ekonomi, (ii) Sosial, (iii) Lingkungan, dan (iv) tata kelola dengan hukum yang berkeadilan dalam pelaksanaan pembangunan).

2. KerangkaKonseptual Program kerjaPengawasan



Gambar 3
KerangkaKonseptual Program Kerja : ImplementasiAkuntabilitas Pembangunan SDGs/TPB

Landasan Program Kerja Pembangunan

Kondisi Kalimantan Selatan :

Inflasi Kota Banjarmasin terkait dengan level inflasi Kalimantan Selatan, yang pada triwulan II 2022 tetap terjaga sebesar 5,95% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi triwulan I 2022 yang sebesar 3,65% (yoy). Inflasi tersebut relative moderat dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Kalimantan, dan lebih tinggi dari inflasi nasional, namun masih berada dalam sasaran inflasi nasional tahun 2022 yang sebesar $3\% \pm 1\%$. Inflasi tahunan terutama bersumber dari inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh kelompok transportasi, kelompok pakaian dan alas kaki, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Sementara itu, inflasi triwulan III 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2022 seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di tengah peningkatan harga energi. Peningkatan mobilitas masyarakat diprediksi menjadi sumber tekanan utama didukung oleh perbaikan kondisi pandemic COVID-19. Harga minyak dunia yang masih tinggi didorong oleh meningkatnya ketidakpastian akibat kondisi geopolitik khususnya Rusia – Ukraina serta pasokan global yang belum dapat mengimbangi kenaikan permintaan seiring dengan pemulihan ekonomi global sehingga diperlukan penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi (Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan, BI, Agustus, 2022).

1. Perspektif Pembangunan Kota Banjarmasin BAIMAN Kalimantan Selatan

Apakah IKN akan terwujud, tergantung implementasi yang efektif dari program yang digariskan. Secara geografis, Kalimantan Selatan sebagai Provinsi yang berada sebagai pintu gerbang IKN (Kalimantan Timur).

Posisi strategis Kalimantan Selatan. Posisi Kalimantan Selatan berada di sentral Indonesia berada di antara alur laut kepulauan Indonesia (ALKI II), potensi terbebas dari gempa dan gunung api. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berada pada wilayah 1 menurut zone gempa di Indonesia, sehingga daerah ini relative aman dari ancaman bencana gempa dan tsunami. (Profil Daerah Rawan Bencana 2007)

LUAS WILAYAH 37.530,52 Km² = 6,96 % dari Pulau Kalimantan.

Gambaran Perairan Laut:

Perairan Provinsi Kalimantan Selatan berada pada ALKI-2 (Alur Laut Kepulauan Indonesia) § Jalur pelayaran Internasional yang cukup strategis dan menjadi persinggahan kapal-kapal dari Australia Barat ke Filipina, Taiwan, dan China maupun sebaliknya. Jalur pelayaran

Internasional ke wilayah Utara menuju ke negara tetangga. Negara tersebut seperti Malaysia, Brunei, Filipina, China, Korea, Hongkong, Jepangdll.

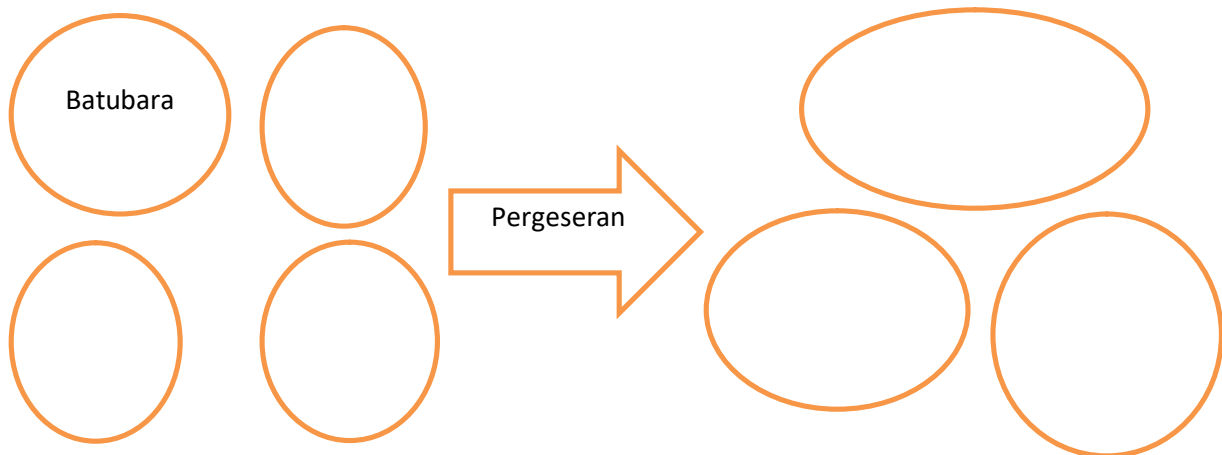
BONUS DEMOGRAFI 2030-2040: STRATEGI INDONESIA TERKAIT KETENAGAKERJAAN DAN PENDIDIKAN” Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

Kalimantan Selatan:

Kondisi Kalsel (data bps 2019) Jumlah penduduk 4.244.096 Jiwa : Persentase Penduduk yang Produktif Yaitu umur (15 Sampai dengan 64) adalah sebesar 67,6 % dari jumlah penduduk; Potensi Bonus Demografi Mendatang Yaitu umur (0 Sampaidengan 14) adalah sebesar 27,9 % dari jumlah penduduk. Jumlah usia produksi mencapai 67,6 % (usia 20 Tahun - 64 Tahun).

Arah Pembangunan Kalimantan Selatan: Transformasi Struktur Ekonomi

Bahan Mentah/ Setengah Jadi (WIP)	Sektor Unggulan
-----------------------------------	-----------------



Rencana Pembangunan Wilayah

Model program Kerja dengan landasan program kerja mengacu Rencana Pembangunan Wilayah “Banua” (Bappeda Prov kalsel, 2020). Program kerja ini memiliki tiga fungsi utama, yaitu: (i) Sebagai pandangan Calon Legislatif DPRD Kalimantan Selatan Dapil Kota Banjarmasin terhadap dinamika pembangunan di Kalimantan Selatan; (ii) menyajikan informasi terkini mengenai kondisi ekonomi daerah, social, dan lingkungan berkelanjutan terkait ketenaga kerjaan, energy, dan kesejahteraan serta prospek perekonomian Kalimantan Selatan kedepan untuk mendukung pembentukan pembangunan berkelanjutan dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan sektoral di Banua; (iii) sebagai media bagi “agent of development” memberikan akuntabilitas kepada masyarakat luas di daerah Dapil Kota Banjarmasin ; dan (iii) menjadi panduan penting bagi seluruh stakeholders pembangunan di Banua dalam melakukan perumusan kebijakan dan keputusan ekonomi, social dan keberlanjutan lingkungan.

Melalui Rencana Pembangunan Wilayah Banua:

1. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi : Banua Anam: Cantung Sengayam: KI Batulicin: KI Jorong
2. Kawasan Penyangga Pangan : Rawa Batang Banyu
- 3. Kawasan Pusat Perdagangan: Barito Kuala, Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut**
4. Kawasan Strategis Lingkungan dan Pariwisata: GEOPARK MERATUS”
5. Kawasan Ekspor- Impor: KEK Mekar Putih (ALKI II)
6. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Sentra Kelautan Perikanan Terpadu

DATA DUKUNG POTENSI INVESTASI:

Rencana Infrastruktur Strategis: (Pilar Ekonomi-Sosial- dan Lingkungan: SDGs)

Jalan Bebas Hambatan: Banjarbaru- Batulicin (Lokasi : Banjarbaru-Kabupaten Banjar- Kabupaten Tanah Bumbu)

Jalan Lintas Barat : Kab. Barito Kuala – Kab. Tapin – Kab. HSU – Kab. Tabalong

Pengembangan “Geopark Pegunungan Meratus” : Lokasi : Pegunungan Meratus (Tahura Sultan Adam kab. Banjar dan Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan)

Bendungan Pancur Hanau: Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Sport City dan “Kiram Park” : Desa Kiram Kabupaten Banjar

Pusat Pelatihan dan Pendidikan “ KARHUTLA” : Desa Kiram Kabupaten Banjar

Silicon Valley of Borneo: Desa Kiram Kabupaten Banjar

Jalan Halong- Manggalau: Kecamatan Halong Kab. Balangan - Manggalau

Pasar Induk dan Pusat Distribusi Regional: Jalan Lingkar Selatan Banjarmasin

Sekolah yang Link and Match Dunia Usaha: Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Batulicin, dan Tanah Laut

Bendungan Riam Kiwa: Kecamatan Aranio Kab. Banjar

Rencana “Kereta Api” : Rencana Pembangunan dan Pengoperasian dengan Skema KPBU (Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha) : (i) **Banjarmasin** – Martapura – Rantau – Barabai – Tanjung – Batas Kalimantan Timur (Kearah IKN) (ii) Banjarmasin – Pelaihari – Asam-asam – Satui – Pagatan – Batulicin – Kotabaru – Batas Kalimantan Timur (Kearah IKN): Kereta BANDARA

Rencana Pembangunan SDM (Pilar Sosial SDGs)

Bappenas, 22 Mei 2017 pada Lokakarya “BONUS DEMOGRAFI 2030-2040: STRATEGI INDONESIA TERKAIT KETENAGAKERJAAN DAN PENDIDIKAN” Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumberdaya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

Kondisi Kalsel (data bps 2019) Jumlah penduduk 4.244.096 Jiwa a) Persentase Penduduk yang Produktif Yaitu umur (15 Sampai dengan 64) adalah sebesar 67,6 % dari jumlah penduduk. b) Potensi Bonus Demografi Mendatang Yaitu umur (0 Sampai dengan 14) adalah sebesar 27,9 % dari jumlah penduduk.

Pembangunan SDM (Pilar Sosial-SDGs)

Program pembangunan dalam menghadapi : Pengangguran, Kemiskinan, dan Gini Rasio Kalimantan Selatan

Pembangunan yang menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka Kalsel Tahun 2024-2030

Pembangunan yang menurunkan Tingkat Kemiskinan Nasional dan Kalsel Tahun 2024-2030

Pembangunan untuk menurunkan Rasio GINI Kalsel Tahun 2024-2030

Pembangunan untuk mendorong peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel Tahun 2024-2030: Meningkatkan kinerja IPM Kalimantan Selatan yang menempati peringkat ke 22 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia;

Pembangunan yang memperkuat kemampuan Pengeluaran Perkapita Nasional dan Kalsel Tahun 2024- 2030 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun): Meningkatkan kinerja Kalimantan Selatan yang menempati peringkat ke 6 dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia (Rp. 12.062 ribu).

Arah Pembangunan SDM (Industri – Pendidikan)

Jurusan Industri Lokasi : ULM dan Kementerian Perindustrian

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Lokasi : Kawasan Industri Batulicin Instansi Terkait: Kementerian Perhubungan

Jurusan Ke Bandaraan Lokasi : ULM Instansi Terkait: ULM dan Kementerian Perhubungan

Jurusan Ke Pelabuhan Lokasi : ULM Instansi Terkait: ULM dan Kementerian Perhubungan

Jurusan Teknik Perkapalan Lokasi : ULM Instansi Terkait: ULM

Jurusan Geologi Lokasi : ULM Instansi Terkait: ULM

Arah Pembangunan SDM (Pertanian dan Pangan)

Politeknik Kerawaan Lokasi : Handil Bakti (Barito Kuala) Instansi Terkait : Kementerian PUPR

Politeknik Peternakan Lokasi : Politeknik Tanah Laut Instansi Terkait: Kemenristek dan Kementerian Pertanian

Arah Pembangunan SDM (Pariwisata)

Jurusan Seni dan Budaya Lokasi : ULM Instansi Terkait : ULM, Kemenristek, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan

Jurusan Pariwisata / Ilmu Pariwisata Lokasi : ULM Instansi Terkait : ULM, Kemenristek, dan Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif

Arah Pembangunan SDM (Leverage Technology- Digital)

Program pembangunan “Silicon Valley of Borneo”: Lokasi Kiram Instansi Terkait: Kemenristek

Pengembangan Sosial-Ekonomi- Lingkungan Banua

Pengembangan nilai ekonomi - sosial dan lingkungan berkelanjutan untuk Komoditi Unggulan : untuk nilai tambah dan mata rantai nilai bisnis Banua. Program pengembangan sesuai potensi dan komoditi unggulan Kabupaten di banua Kalimantan Selatan.

- Program pengembangan karet rakyat tersebar di Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara.
- Program pengembangan perkebunan kelapa yang tersebar pada empat kabupaten yakni Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Pembangunan berkelanjutan "Komoditas lainnya seperti kopi, kakao, kayu manis dan nilam juga dikembangkan termasuk pemurnian dan pembangunan kebun entrys karet di beberapa kabupaten.
- Kegiatan pengembangan komoditas tersebut sejalan dengan program utama pembangunan perkebunan jangka menengah yang meliputi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan.
- Program peningkatan nilai tambah, daya saing, pengolahan, pemasaran dan ekspor hasil perkebunan dengan kegiatan prioritas, peningkatan mutu daya saing, pemasaran hasil, pembinaan kemitraan.
- Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana perkebunan dengan kegiatan prioritas inventarisasi , uji terap lapangan pupuk dan pestisida, dan lain-lain
- Program pengembangan bisnis komoditas/Produk unggulan kabupaten berdasarkan sektor. Melalui sector peternakan dan perikanan komoditas unggulan adalah sapi, sector kehutanan dan perkebunan komoditas unggulan adalah perkebunan kelapa sawit, sector

tanaman pangan dan hortikultura komoditi unggulannya adalah padi, sector industry komoditas unggulan adalah kerajinan rotan, dan sector jasa perdagangan komoditas unggulan adalah hotel/penginapan.

- Program penguatan SDG/TPB melalui perkebunan kelapa sawit Rakyat dalam perolehan sertifikasi ISPO.
- Program pengembangan perkebunan kelapa sawit terkait kebijakan moratorium kelapa sawit yang regulasinya sudah selesai.

“Program keterlibatan Peran Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Pembangunan ekonomi-sosial dan lingkungan banua”

PENGAWASAN PADA MODEL STRATEGIK PEMBANGUNAN BANUA

Pengawasan dilakukan dengan pendekatan Pengawasan demokratis di mana melibatkan peran legislative Pemerintah Kota Banjarmasin, dan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Serta dasar pengendalian manajemen yang dilakukan pihak eksekutif atau Pemerintah daerah. Memiliki relasi tindakan atas persetujuan dan diskusi bersama atau dengan kata lain adanya konsultasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini juga dikenal sebagai pengawasan partisipatif atau konsultatif. Kemudian dengan pendekatan Pengawasan Birokrasi: di mana relasi legislative dan eksekutif berjalan sesuai peraturan dan regulasi yang ada, mengikuti aturan dan peraturan ini dengan akuntabilitas. Catatan serius tentang ketidaksesuai pelaksanaan aturan dan peraturan ini diambil oleh pengawas. Hal ini membawa stabilitas dan keseragaman dalam organisasi. Namun dalam prakteknya tak terlihat adanya keterlambatan dan ketidakefisienan dalam bekerja akibat pengawasan birokrasi.

Visi	Menjadikan masyarakat Banua “Kota Banjarmasin” mencapai hasil pembangunan berkelanjutan menuju 2024-2030			
Misi	Menyediakan disain program pembangunan berkelanjutan “Kota Banjarmasin” dalam 4 tataran SGG/TPB dengan model pengawasan pembangunan berkelanjutan			
Tema strategic pembangunan	Pembangunan multi sektora terkait Pilar pembangunan ekonomi: tujuan 7, 8, 9, 10, 17 SDG/TPB;	Pembangunan multi sektoral terkait Pilar pembangunan sosial: tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5 SDG/TPB;	Pembangunan multi sektoral terkait Pilar pembangunan lingkungan: tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15 SDG/TPB,	Pembangunan multi sektoral terkait Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: tujuan 16 SDG/TPB
Stakeholder utama pembangunan	Kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan masyarakat	Kesejahteraan masyarakat
Objektif pembangunan	Prioritas pada berbagai aktifitas-program: 7. Energi Bersih dan Terjangkau; 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; 10. Berkurangnya Kesenjangan; 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.	Prioritas pada berbagai aktifitas – program: 1. Tanpa kemiskinan; 2. Tanpa kelaparan; 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4. Pendidikan Berkualitas; 5. Kesenjangan Gender;	Prioritas pada berbagai aktifitas-program: 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak; 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab; 13. Penanganan Perubahan Iklim; 14. Ekosistem Lautan; 15. Ekosistem Daratan;	Prioritas pada berbagai aktifitas-program: 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
Strategi	Deskripsi kemudahan dan akses melakukan kegiatan berusaha : (i) Masyarakat; (ii) dunia usaha (UMKM-Koperasi) ; (iii) Usaha skala besar (Investor PMDN-PMA) dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.	Deskripsi kemudahan dan akses mendapatkan layanan social secara menyeluruh dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.	Deskripsi kemudahan dan akses mendapatkan keberlanjutan lingkungan alam sebagai dampak pembangunan dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.	Deskripsi kemudahan dan akses mendapatkan layanan lembaga dengan keadilan hukum sebagai pemenuhan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.
Implementasi	Jangkauan Program pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui : (i) SKPD Pemerintah Daerah (Provinsi-Kabupaten-Kota) ; (ii) Instansi vertical pemerintah pusat di daerah	Jangkauan Program pembangunan social berkelanjutan melalui : (i) SKPD Pemerintah Daerah (Provinsi-Kabupaten-Kota) ; (ii) Instansi vertical pemerintah pusat di daerah	Jangkauan Program pembangunan lingkungan berkelanjutan melalui : (i) SKPD Pemerintah Daerah (Provinsi-Kabupaten-Kota) ; (ii) Instansi vertical pemerintah pusat di daerah	Jangkauan Program pembangunan hukum dan tata kelola birokrasi melalui : (i) SKPD Pemerintah Daerah (Provinsi-Kabupaten-Kota) ; (ii) Instansi vertical pemerintah pusat di daerah
Hasil strategic pembangunan	Capaian program urusan pembangunan melalui peran Task force SKPD dan Instansi vertical di daerah-Tupoksi;	Capaian program urusan pembangunan melalui peran Task	Capaian program urusan pembangunan melalui peran Task force SKPD dan Instansi vertical di	Capaian program urusan pembangunan melalui peran Task force SKPD dan Instansi vertical di daerah-

	ESDM; Statistik; Tenaga Kerja; Koperasi, Usaha Kecil, &Menengah; Pariwisata; Penanaman Modal; Perhubungan; PU & Penataan Ruang; Perindustrian; Perdagangan; Komunikasi&Informatika; Sosial; Pemberdayaan masyarakat & desa;	force SKPD dan Instansi vertical di daerah– Tupoksi: Sosial; Kesehatan; Pendidikan; Perumahan rakyat & kawasan permukiman; Tenaga Kerja; Pangan; Adminduk capil; Koperasi UKM; ESDM; Kelautan perikanan; Dalduk KB; Pemberdayaan masy. Desa; Pemberdayaan Perempuan &Perlindungan Anak;	daerah - Tupoksi : Pekerjaan Umum &Penataan Ruang Perhubungan; Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat; Lingkungan Hidup; Kelautan &Perikanan; Kehutanan	Tupoksi: Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat; Pemberdayaan Perempuan &Perlindungan Anak; Statistik; Komunikasi&Informatika
--	---	--	--	--

PENUTUP

Program pembangunan di Banua Kalimantan Selatan dengan integrasi peran Pemerintah Kota Banjarmasin terus dilanjutkan menuju keberlanjutan pembangunan untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat banua. Kami berkomitmen untuk menjadi mitra eksekutif dan Yudikatif dalam implementasi 4 pilar SDG/TPB di Banua Kalimantan Selatan melalui dukungan konstituen Dapil Kota Banjarmasin. Memberikan pengawasan melalui DPRD Kalsel kepada mitra dalam meyakinkan arah pencapaian tujuan pembangunan.

Banjarmasin, Juni 2023

Helmi Rifai, SH
Caleg Nasdem